# KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah sebagai pengelola anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor *PER-24/PB/2006*  tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Ungaran, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN,

DAN PANGAN

KABUPATEN SEMARANG

**Ir. Wigati Sunu, MBA**

Pembina Utama Muda

NIP 19640106 199103 1 006

**D A F T A R I S I**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAK TARGET**

**KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Kondisi Geografis

2.1.2 Kondisi Demografis

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Pendapatan Daerah

2.2.2 Belanja Daerah

2.2.3 Strategi dan Prioritas

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III IKHTISAR CAPAIAN**

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Mengikuti/menyesuaikan Kebijakan akuntansi Pemda

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

(menyesuaikan data LRA yang ada di SKPD)

5.1 Pendapatan

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.2 Belanja

5.2.1 Belanja Operasional

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Tak Langsung

Belanja Langsung

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2 Belanja Modal

5.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

**PENJELASAN POS POS NERACA (Menyesuaikan Data di Neraca SKPD)**

5.2.1 ASET

5.2.1.1 Aset Lancar

5.2.1.2 Aset Tetap

5.2.1.3 aset Lainnya

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2 Kewajiban Jangka Pendek

5.2.3 EKUITAS

**PENJELASAN POS LO**

8 PENDAPATAN

8.1 PENDAPATAN ASLI

8.3 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

8.4 SURPLUS NON OPERASIONAL

9 BEBAN

9.1 Beban Pegawai

9.2 Beban Barang dan Jasa

9.5 Beban Hibah

9.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

9.9 Beban Lain Lain

**PENJELASAN POS LPE**

**BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1 ORGANISASI

6.2 STRUKTUR KEPEGAWAIAN/SDM

**BAB VII PENUTUP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAFTAR LAMPIRAN :**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lampiran A | **:** | Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2019 | | Lampiran B | **:** | Rekapitulasi Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 | | Lampiran C | **:** | Rekap Setor Kembali/ CP / Contra Post Tahun Anggaran 2019 | | Lampiran D | **:** | Daftar Pengadaan Barang 2019 (Khusus Yang Menambah Aset Neraca) | | Lampiran E | **:** | Selisih Penambahan Aset Dengan Realisasi Belanja Modal Per 31 Des 2019 | | Lampiran F | **:** | Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Per 31 Desember 2019 | | Lampiran G | **:** | Laporan Persediaan Per 31 Desember 2019 | | Lampiran H | **:** | Laporan Pengelolaan Dana Bergulir Per 31 Desember 2019 | | Lampiran I | **:** | Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah Per 31 Desember 2019 | | Lampiran J | **:** | Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Laporan Rugi/Laba | | Lampiran K | **:** | Ihktisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Per 31 Desember 2019 | | Lampiran L | **:** | Daftar Piutang Daerah Per 31 Desember 2019 | | Lampiran M | **:** | Daftar Utang Daerah per 31 Desember 2019 | | Lampiran N | **:** | Daftar Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 | | Lampiran O | **:** | Daftar sisa kas Bendahara Penerimaan Tahun 2019 | | Lampiran P | **:** | Daftar Sisa Kas Selain Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahar Penerimaan | | Lampiran Q | **:** | Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020 | | Lampiran R | **:** | Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020 | | Lampiran S | **:** | Laporan atas dana yang ada dalam APBD tetapi tidak melalui kas daerah | | Lampiran T | **:** | Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa | | Lampiran U | **:** | Rekapitulasi Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember 2020 |   **Lampiran Pendukung CALK** |
| Neraca Aset Per 31 Desember 2019  Laporan Mutasi Aset Hewan Per 31 Desember 2019  Laporan Mutasi Persediaan Hewan/ Ikan Per 31 Desember 2019 |

Ungaran, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

Kabupaten Semarang

Selaku

Pengguna Anggaran

**Ir. Wigati Sunu, MBA**

Pembina Utama Muda

NIP 19640106 199103 1 006

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan berupa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laoporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, gNeraca, LO dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan , menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Tujuan Pelaporan Keuangan :**

1. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang undangan
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil – hasil yang telah dicapai
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

**1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mengatur Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ;
3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang ;
4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019.

Bahwa setiap OPD harus menyusun pelaporan dengan cara melakukan konversi/penyesuaian laporan keuangan dari format lama ke format baru sebagaimana diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2013, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO dan LPE. Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, Kabupaten Semarang dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai format yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2013 tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang selaku Pengguna Anggaran.

**1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bab | I. | Pendahuluan  Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). |
| Bab | II. | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD  Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD. |
| Bab | III. | Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan  Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan/kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. |
| Bab | IV. | Kebijakan Akuntansi  Memuat entitas akuntansi keuangan daerah, basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketetentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. |
| Bab | V. | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan   1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 2. Penjelasan pos-pos Neraca 3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional 4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas |
| Bab | VI. | Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan  Memuat rincian tentang profil Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. |
| Bab | VII. | Penutup |

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**

**TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

2.1.1 Kondisi Geografis

Luas Kabupaten Semarang secara keseluruhan sebesar 95.020,67 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri dari 19 wilayah kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Kabupaten Semarang letaknya diuntungkan secara geografis, mengingat posisinya yang strategis terletak diantara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah DIY, Solo dan Semarang ( Joglosemar ). Posisi startegis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.

Kabupaten Semarang secara geografis berbatasan dengan batas administratif sebagai berikut ;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
5. Di tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada akhir 2018 tercatata sebanyak 1.022.423 jiwa yang terdiri dari 512.269 laki laki dan 510.154 perempuan. Jumlah penduduk ini dibandingkan dengan akhir tahun 2017 sebesar 1.011.635 jiwa terdapat kenaikan sebanyak 10.788 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebanyak 0,53%. Adapun jumlah Kepala Keluarga dari 322.603 KK pada tahun 2017 bertambah menjadi 332.024 KK pada tahun 2018, atau mengalami kenaikan sebanyak 9.421 KK

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2018, maka Kecamatan Ungaran Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni sebanyak 77.812 jiwa, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Bancak yakni sebanyak 24.258 jiwa.

Untuk kepadatan penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2017 rata-rata sebesar 1.064,64 jiwa/km2, sedangkan pada akhir tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 2.187,57 jiwa/km2, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ambarawa yakni sebesar 2.208,01 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk yang terendah ada di Kecamatan Bancak sebesar 553,20 jiwa/km2.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada Tahun 2018 sebanyak 5,79%, terjadi peningkatan sebesar 0,24% bila dibandingkan Tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2018 jika dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sekitar masih lebih tinggi namun lebih rendah dari Kota Semarang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2018 sebesar 5,32% dan Nasional 2,80% lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,71%. Sedangkan laju inflasi tahun 2018 adalah sebesar 2,80 lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,67.

Angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2013 - 2018 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel : Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Semarang

Tahun 2013 – 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,62 | 5,85 | 5,52 | 5,30 | 5,69 | 5,79 |
| Laju Inflasi | 8,11 | 8,63 | 2,85 | 2,39 | 3,67 | 2,80 |

*Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2019*

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Semarang adalah 7,62 tahun atau berada di posisi 13 besar di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Semarang berada di posisi 11 se-Provinsi Jawa Tengah dengan besaran angka IPM yaitu 73,61. *( Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019 ).*

**Tabel : Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Semarang**

**Tahn 2014 - 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kabupaten Semarang | 71,65 | 71,89 | 72,40 | 73,20 | 73,61 |
| Provinsi Jawa Tengah | 68,78 | 69,49 | 69,98 | 70,52 | 71,12 |

***Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2019***

**2.2 Kebijakan Keuangan**

**2.2.1 Pendapatan Daerah**

Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan :

Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto,yang berarti bahwa semua pendapatan daerah tidak boleh terlebih dulu dikurangi dengan belanja atau biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut, atau juga tidak boleh dikurangi dengan bagian pihak lain dalam rangka bagi hasil;Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada peraturan perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;Upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola pendapatan daerah;Pendapatan asli daerah ditetapkan minimal naik 15% dari pendapatan pada APBD Perubahan tahun sebelumnya.

**2.2.2. Belanja Daerah**

Kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaan anggaran belanja meliputi :

1. Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek;
2. Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah;
3. Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan bahwa angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah;
4. Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah;
5. Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung;
6. Belanja daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak terselesaikan.

**2.2.3 Strategi dan Prioritas**

* + - 1. Menekan angka kemiskinan sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi;
      2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan formal maupun non formal sehingga dapat bersaing dalam memperoleh lapangan kerja;
      3. Meningkatnya daya saing daerah dan kualitas produk pertanian dan industri kecil/rumah tangga dan produk jasa pariwisata;
      4. Meningkatnya kualitas sumber daya alam dengan pengelolaan yang terkendali;
      5. Pemerataan pembangunan antar wilayah dan infrastruktur wilayah;
      6. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat pedesaan terutama fasilitas pendidikan dasar, kesehatan, air bersih, transportasi, perumahan, jalan lingkungan, saluran limbah dan irigasi;
      7. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang memadai seperti jalan-jalan perkotaan, saluran air bersih, persampahan, trotoar, taman kota, arena bermain dan lain-lain;
      8. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dengan peningkatan kinerja aparatur, peningkatan sumber daya aparatur, mengefektifkan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan;
      9. Meningkatkan peran serta masyarakat desa/ kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan publik,penganggaran dan pengawasan.

**2.3 Indikator PencapaianTarget Kinerja APBD**

Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten SEMARANG sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah ”Terwujudnya Kabupaten Semarang yang memiliki daya saing ekonomi berbasis MATRA (MANDIRI TERTIB dan SEJAHTERA), yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serata saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mempu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan Bernegara”. Selain itu juga mengacu pada visi Dinas yaitu ”Terwujudnya Kabupaten Semarang MANDIRI, TERTIB, SEJAHTERA (MATRA).”

Untuk mendukung visi tersebut di atas, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dalam tahun anggaran 2019 telah merealisasikan kinerjanya, yang mencakup 20 program dan 75 kegiatan dengan ringkasan capaian indikator keluaran per bidang sebagai berikut :

(untuk indikator tingkat manfaat/outcome, tersaji dalam Form Pengukuran KinerjaKegiatan/ PPK LAKIP Dinas 2019).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **CapaianTarget Kinerja (Ringkasan Keluaran)** |
| a. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Pengelolaan surat menyurat. Terselenggara administrasi surat menyurat, tersedianya barang cetakan. 2. Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.Terbayarnya jasa komunikasi, air, listrik, dan tersedia alat-alat listrik dan penerangan selama 12 bulan. 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor : Sentral Telepon PABX 1 unit, telepon langsung unit, *intercom* 18 unit, mesin *faximile* 1 unit, jaringan wifi 2 unit, *router*  *5 unit, sound system* 2 unit, *wireless* 3 unit, komputer 33 unit, *notebook* 30 unit, CCTV 8 unit, mesin ketik manual 6 unit, AC 35 unit, LCD 4 unit, *vacuum cleaner* 1 unit, lemari 2 unit, brankas 1 unit, meja kursi tamu 1 unit, meja kerja 8 unit, dan kursi kerja 10 unit. 4. Penyediaan logistik kantor, tersedia BBM 1100 Lt, tersedia surat kabar dan majalah 12 bulan, tersedia tabung gas 22 kl, tersedia aqua gallon 444 galon, tersedia bahan sembako 11 bulan,tersedia makanan dan minuman harian pegawai sebanyak 160 pegawai, tersedia makanan dan minuman rapat selama 4 kali rapat, tersedia makanan dan minuman tamu sebanyak 80 dos, terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 50 kali. 5. Penatausahaan administrasi keuangan SKPD, tersusunnya laporan keuangan bulanan sebanyak 12 dokumen, tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen, tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen, tersusunnya laporan SPP,SPJ dan SPM selama 12 bulan, tersusunnya laporan PAD sebanyak 12 dokumen, tersedianya honor pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan, terlaksananya monitoring dan intensifikasi PAD di 12 wilayah kecamatan. 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, tersedia peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 65 item selama 12 bulan. 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, terlaksananya keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jawa 3 kali, ke DKI Jakarta/Jawa Barat/Jawa Timur 9 kali, ke DI Yogyakarta dan ke Jawa Tengah 5 kali, ke Kota Semarang 20 kali, ke Kota Salatiga 20 kali. 8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran, terbayarnya instruktur senam sebanyak 1 orang selama 11 kali, terbayarnya instruktur senam sebanyak 3 orang sebanyak 1 kali, terbayarnya gaji PTT sebanyak 1 orang selama 14 bulan, terbayarnya honor THL TBPP sebanyak 68 orang selama 1 bulan, terbayarnya THL medik dan paramedik vetiriner pusat sebanyak 6 orang selama 2 bulan, terbayarnya honor pengambilan sampah sebanyak 2 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga parkir pasar hewan sebanyak 10 orang selama 73 hari pasaran Pon, terbayarnya tenaga administrasi kantor sebanyak 8 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga kebersihan sebanyak 24 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga sopir sebanyak 2 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga keamanan sebanyak 24 orang selama 12 bulan, terbayarnya penjaga malam sebanyak 6 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga parkir STA Jetis sebanyak 8 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga keur master sebanyak 2 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga medik vertreriner sebanyak 1 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga paramedik sebanyak 2 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga paramedis sebanyak 1 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga paramedik vetreriner sebanyak 3 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga kolam sebanyak 8 orang selama 12 bulan, terbayarnya tenaga penjaga TPI Rowoboni sebanyak 1 orang selama 12 bulan, terbayarnya upah outsourching sebanyak 23 orang selama 12 bulan, terbayarnya THR tenaga *outsourching* sebanyak 112 orang selama 1 bulan. |
| b. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa-ratur | 1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor, tersedianya peralatan kantor yang terdiri dari proyektor 2 unit dan gordyn 1 paket. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, terpeliharanya lingkungan gedung kantor dinas. 3. Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional, terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 27 unit, terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2 sebanyak 253 unit, terbayarnya KIR kendaraan dinas-terbayarnya pajak sebanyak 17 unit, terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional roda 2sebanyak 253 unit, terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 27 unit. |
| c. | Peningkatan Disiplin Aparatur | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya, tersedianya pakaian dinas harian sebanyak 800 stel 2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai dan administrasi barang daerah selama 12 bulan. |
| d. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal, terlaksananya bimtek barang dan jasa sebanyak 3 orang, terlaksananya ujian barang dan jasa sebanyak 2 orang. |
| e. | Peningkatan Pe-ngembangan Sis-tem Pelaporan Ca-paian Kinerja dan Keuangan | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan SKPD, terlaksananya penyusunan dokumen Lakip, LKPJ, dan LKPD sebanyak 3 dokumen, terlaksananya penyusunan laporan capaian kegiatan bulanan selama 12 bulan. |
| f. | Perencanaan | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, tersedianya dokumen perencanaan 6 kali ; sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah sebanyak 1 dokumen, dokumen RKPD sebanyak 1 dokumen, dokumen RKA dan DPA Penetapan sebanyak 1 dokumen, dokumen RKA dan DPPA Perubahan sebanyak 100 buku, dan pengembangan sistem E-Pertanian sebanyak 1 paket. |
| g. | Peningkatan Ketahanan Pangan | 1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan, terlaksananya sosialisasi konsumsi B2SA dan pelatihan Pola Pangan Harapan sebanyak 1 kali, terlaksananya pelatihan dan survey Pola Pangan Harapan dan Analisa Pangan Masyarakat di Kab. Semarang dengan pendataan di 81 titik . 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan,terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sukabela/ LDPM pada 8 kelompok dan terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUPM/TII pada 8 TII. 3. Pemantauan dan analisis akses dan harga pangan pokok/strategis, terlaksananya monitoring stock dan harga pokok/strategis tingkat distributor di 19 wilayah kecamatan, terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi sebanyak 3 kali. 4. Pengembangan cadangan pangan daerah, terlaksananya pengisian GCPD dengan gabah kering giling sebanyak 28.000 Kg, tersedianya perlengkapan gudang cadangan pangan daerah sebanyak 1 paket 5. Pengembangan desa mandiri pangan, terlaksananya bantuan hibah DMP APBD II sebanyak 1 paket, terlaksananya sosialisasi DMP dan pembentukan Tim Pangan Desa (TPD) sebanyak 1 kali, terlaksananya pelatihan desa mandiri pangan sebanyak 1 kali, terlaksananya pembinaan TPD dan kelompok afinitas DMP sebanyak 4 kali, terlaksananya rapat koordinasi DMP sebanyak 1 kali. 6. Pengembangan lumbung pangan desa, terlaksananya sosialisasi lumbung pangan desa pada 1 desa, terlaksananya pembinaan kelompok tani pada 2 poktan, terlaksananya pelatihan pemberdayaan SDM/ kelembagaan kelompok tani pada 1 poktan. 7. Pengembangan model distribusi pangan tang efisien, terlaksananya bantuan hibah kegiatan tunda jual GKG (Gabah Kering Giling) sebanyak 3 kelompok tani. 8. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, sosialisasi mutu dan keamanan pangan bagi anak sekolah sebanyak 1 kali, terlaksananya monitoring mutu dan keamanan pangan sebanyak 8 kali, tersalurkan bantuan peralatan kantin sekolah sebanyak 2 unit. 9. Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan, terlaksananya rakor dewan ketahanan pangan Tk. Kabupaten sebanyak 1 kali, terlaksananya rakor dewan ketahanan pangan Tk. Kecamatan di 19 kecamatan, terlaksananya pemantauan dan pendampingan rakor DKP kecamatan sebanyak 19 kali. 10. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, terlaksananya pelatihan SKPG sebanyak 1 kali, terlaksananya rapat koordinasi SKPG sebanyak 7 kali, terlaksananya pemantauan data SKPG di 19 kecamatan, terlaksananya penyusunan data neraca bahan makanan sebanyak 2 kali. 11. Pengembangan dan percepatan diversivikasi pangan, terlaksananya lomba menu B2SA tingkat kabupaten sebanyak 1 kali, terlaksananya lomba menu B2SA tingkat provinsi sebanyak 1 kali, terlaksananya festival pangan sebanyak 1 kali, terlaksananya lomba dan pameran makanan khas di TMII sebanyak 1 kali, terlaksananya partisipasi lomba dalam rangka HPS provinsi sebanyak 1 kali. 12. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, terlaksananya bantuan kebun bibit sebanyak 1 unit, terlaksananya bantuan kandang ayam sebanyak 1 unit, terlaksananya bantuan bibit dan benih cabe, tomat, sawi, mangga, alpukat, strawberi dan brokoli sebanyak 1 paket, terlaksananya bantuan ternak ayam sebanyak 80 ekor, terlaksananya bantuan sarana budidaya (plastik semai, tray, polibag, selang, pupuk kandang, NPK dan furadan) sebanyak 1 paket, terlaksananya bantuan prasarana media tanam sebanyak 1 paket, terlaksananya pembinaan dan sosialisasi pemanfaatan pekarangan sebanyak 3 kali. |
| h. | Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, terlaksananya SL-PHT tanaman padi sebanyak 60 orang. 2. Peningkatan kemampuan lembaga petani, terlaksananya pertemuan kelompok tani sebanyak 3 kali, terlaksananya pertemuan wanita tani sebanyak 3 kali, terlaksananya pertemuan pemuda tani sebanyak 3 kali, dan terlaksananya verifikasi poktan teladan sebanyak 38 poktan. |
| i. | Peningkatan Produksi Pangan | 1. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija, terlaksananya monev peningkatan mutu intensifikasi sebanyak 12 kali, terlaksananya monev penggunaan benih unggul padi sebanyak 12 kali, terlaksananya monev penggunaan benih unggul jagung sebanyak 12 kali, terlaksananya monev penggunaan benih kedelai sebanyak 12 kali, terlaksananya monev pemupukan berimbang sebanyak 12 kali, terlaksananya bantuan *rice mill unit* (penggilingan padi) sebanyak 4 unit, terlaksananya bantuan alat pemipil jagung (*corn sheller*) sebanyak 10 unit dan terlaksananya pengiriman peserta PEDA KTNA sebanyak 24 orang. 2. Pengembangan diversifikasi tanaman, terbangunnya Jalan Usaha Tani (JALUT) sebanyak 42 unit; tersedianya alat sarana angkut panen/kendaraan roda tiga sebanyak 60 unit, terlaksananya demplot tembakau sebanyak 12 Ha, terlaksananya bimtek sebanyak 120 orang, terlaksananya SLPHT sebanyak 90 orang. 3. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan; terlaksananya pengadaan bibit padi bersertifikat sebanyak 11.600 kg, bibit jagung manis sebanyak 3.050 kg, bibit alpukat sebanyak 600 btg; bibit pisang sebanyak 1.200 btg, terlaksananya pengadaan pupuk sebanyak 1 paket, terlaksananya pengadaan bahan material sebanyak 1 paket, pengadaan obat-obatan sebanyak 1 paket. 4. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya, terlaksananya peremajaan tanaman cengkeh sebanyak 4.000 batang, terlaksananya intensifikasi tanaman cengkeh sebanyak 2 kelompok tani, terlaksananya pengadaan alat pasca panen kopi sebanyak 2 paket. 5. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian, terlaksananya penyusunan DED jalut (APBD Kab) sebanyak 2 paket, terlaksananya penyusunan DED jitut (APBD Kab) sebanyak 1 paket, terlaksananya pengawasan jalut (APBD Kab) sebanyak 2 paket, terlaksananya pengawasan jitut (APBD Kab) sebanyak 1 paket, terlaksananya pembangunan jalut (APBD Kab) sebanyak 36 unit, terlaksananya pembangunan jitut (APBD Kab) sebanyak 18 unit, terlaksananya pembangunan irigasi air tanah dangkal (DAK) sebanyak 1 unit dan terlaksananya pembangunan irigasi tanah dalam sebanyak 5 unit. 6. Pengembangan intensifikasi tanaman hortikultura, terlaksananya bantuan bibit tanaman buah alpukat sebanyak 1.760 batang, terlaksananya bantuan benih jahe sebanyak 1.000 kg ; terlaksananya bantuan saprodi kawasan sayur organik terdiri atas mulsa plastic hitam perak 8 roll, dan terlaksananya penyuluhan budidaya sesuai dengan GAP/SOP sebanyak 300 orang. 7. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, terbangunya rumah burung hantu sebanyak 30 unit dan terlaksananya rapat koordinasi pengendalian OPT sebanyak 12 kali. |
| j. | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Pedesaan Produksi Hasil pertanian/perkebunan, terlaksananya pemeliharaan gedung tempat kerja sebanyak 1 unit; peningkatan fasilitas kantor sebanyak 1 unit; pemeliharaan fasilitas pemasaran sebanyak 1 paket. 2. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah, terlaksananya promosi produk unggulan daerah (nasional dan regional) sebanyak 4 kali. 3. Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat; terlaksananya pengadaan sepeda motor roda 3 sebanyak 3 unit, terlaksananya peningkatan fasilitas kantor sebanyak 1 unit, terlaksananya pemeliharaan fasilitas pemasaran sebanyak 1 unit. |
| k. | Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna; terlaksananya pembuatan embung (DAK) sebanyak 3 unit dan terlaksananya pembuatan dam parit (DAK) sebanyak 6 unit. |
| l. | Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. | 1. Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan, terlaksananya pengadaan pestisida untuk menanggulangi hama, penyakit,gulma sebanyak 631 kg/ltr.   2) Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan , terbangunnya jalan usaha tani sebanyak 42 unit, tersedianya alat angkut roda tiga sebanyak 60 unit, terlaksananya SL-PHT tanaman cengkeh sebanyak 25 orang, terlaksananya SL-PHT tanaman kopi sebanyak 25 orang, terlaksananya kajian teknis komoditas kopi sebanyak 45 orang dan tersedianya pestisida cair sebanyak 80 Liter. |
| m. | Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. | 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan, terlaksananya pengadaan almari kantor 2 pintu sebanyak 22 unit, terlaksananya pengadaan komputer/PC sebanyak 21 unit, terlaksananya pengadaan printer sebanyak 25 unit, terlaksananya pengadaan meja kerja sebanyak 22 unit, terlaksananya pengadaan kursi kerja sebanyak 22 unit, terlaksananya pengadaan kamera sebanyak 3 unit, terlaksananya pengadaan laptop sebanyak 25 unit, terlaksananya pengadaan sepeda motor sebanyak 2 unit dan terlaksananya pengadaan drone sebanyak 1 unit. 2. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan, terfasilitasinya sarana dan prasarana penyuluhan di 19 BPP dan terfasilitasinya penilaian angka kredit penyuluh sebanyak 58 orang. 3. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan, tersusunnya programa penyuluhan kecamatan dan kabupaten sebanyak 20 buku. |
| n. | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 1. Pendataan Masalah Peternakan, terlaksananya pendataan penyakit ternak dan ikan sebanyak 12 jenis penyakit dan teramatinya penyakit ternak dan ikan sebanyak 250 pengamatan. 2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, terlaksananya vaksinasi ternak sebanyak 1.800 ekor; terlaksananya vaksinasi unggas sebanyak 80.000 ekor; terlaksananya pemeriksaan kesehatan ternak dan reproduksi hewan sebanyak 1.400 ekor; terlaksananya kesehatan ikan sebanyak 2 kali, terlaksananya monitoring kegiatan sebanyak 19 kali, terlaksananya konsultasi dan koordinasi kesehatan hewan sebanyak 1 kali dan terlaksananya pertemuan keswan/puskeswan sebanyak 1 kali. 3. Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah; terlaksananya pengawasan lalu lintas perdagangan ternak selama 12 bulan di 7 pasar hewan; terlaksananya pemeriksaan dan pengobatan ternak selama 12 bulan sebanyak 40.000 ekor. 4. Peningkatan saran dan prasarana pelayanan kesehatan ternak, terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan sebanyak 1 paket dan terlaksannya pengawasan obat hewan sebanyak 6 kali. 5. Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan, terperiksanya sampel untuk penyakit hewan ( pelayanan pasif ) yang terdiri dari pullorum 1.000 sampel, brucella 3.000 sampel, AI/ND 500 sampel, helminthiasis 80 sampel, terperiksanya sampel untuk penyakit hewan (pelayanan aktif) atas AI/ND sebanyak 110 sampel, terperiksanya sampel untuk produk hewan yang terdiri atas 625 sampel susu, 325 sampel daging dan terlaksanya konsultasi dan koordinasi di bidang laboraturium sebanyak 2 . |
| o. | Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 1. Pembibitan dan Perawatan Ternak, terlaksananya pertemuan inseminator dan koordinasi perbibitan sebanyak 4 kali, terlaksananya monitoring perbibitan (PKB, uji petik semen beku, kelompok pembibitan) selama 12 bulan, terlaksannya peningkatan SDM inseminator (ATR/PKB/Retraining) sebanyak 2 inseminator dan terlaksananya kontes ternak sebanyak 1 paket. 2. Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak, terlaksananya pengawasan peredaran pakan sebanyak 10 sampel, terlaksananya pembinaan pakan/budidaya terhadap petugas, produsen, konsumen dan distributor pakan ternak sebanyak 50 orang dan memfasilitasi pertemuan/koordinasi pakan/laboratorium pakan sebanyak 5 kali. 3. Pengembangan agribisnis peternakan, terlaksananya bimbingan teknis budidaya ternak dan pengelolaan kotoran ternak sebanyak 50 orang dan terlaksananya monitoring dan pembinaan budidaya dan usaha peternakan sebanyak 20 orang. 4. Pembinaan dan Pengamanan Perbibitan Ternak, terbinanya kelompok perbibitan ternak sebanyak 80 kelompok dan pelaksanaan monitoring ternak pemerintah sebanyak 1.763 ekor. |
| p. | Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan, terlaksananya pembuatan dokumen UKL UPL Pasar Hewan Ambarawa sebanyak 1 paket. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan, terlaksananya operasionalisasi Pasar Hewan Ambarawa sebanyak 1 unit dan terlaksananya operasionalisasi pasar hewan di wilayah kecamatan sebanyak 5 unit. 3. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah, terlaksananya promosi unggulan daerah produk peternakan sebanyak 1 kali, terlaksananya gerakan minum susu olahan untuk anak sekolah sebanyak 5.000 orang dan terlaksananya penyuluhan pengolahan hasil peternakan sebanyak 1 kali. 4. Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan, terlaksananya pembinaan kelompok/peternak yang mengakses asuransi usaha ternak sapi (AUTS) sebanyak 50 orang dan terlaksananya pembinaan usaha agribisnis peternakan sebanyak 30 orang. |
| q. | Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1. Pengamanan Produk Hewan dan Ikutannya, terlaksananya pengawasan kesehatan dan keamanan produk pangan asal hewan di 19 kecamatan yang terdiri atas 625 sampel susu dan 325 sampel daging, terlaksananya pengujian laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner di 19 kecamatan yang terdiri atas masing 120 sampel susu, daging dan telur, terlaksananya pemantauan dan pengawasan peredaran produk hewan sebanyak 6 lokasi ( 4 RPH dan 2 RPH-U ), terlaksananya pembinaan teknis higiene sanitasi dan NKV sebanyak 19 kecamatan dan terlaksananya jasa konsultasi perencanaan/DED IPAL RPH-R/RPH-U Kab. Semarang sebanyak 5 lokasi. 2. Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan, terlaksananya pengendalian, penanggulangan penyakit zoonosa dan peningkatan kesejahteraan hewan di 19 kecamatan. 3. Operasionalisasi UPTD RPH/RPU, terlaksananya operasional pemotongan ternak yang ASUH di 6 lokasi. |
| r. | Pengembangan Budidaya Perikanan | 1. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, terlaksananya pembinaan rutin kel. Pembudidaya ikan (pembesaran) sebanyak 120 rtp, terlaksananya hibah pengembangan budidaya ikan sebanyak 2 kelompok dan terlaksananya percontohan budidaya ikan (DAK) sabanyak 3 kelompok. 2. Pembinaan dan pengembangan perikanan, terlaksananya pelatihan budidaya lele sebanyak 60 rtp, terlaksananya pelatihan pembenihan ikan sebanyak 30 orang dan terlaksananya sosialisasi penataan karamba sebanyak 60 orang. 3. Operasionalisasi balai benih ikan, terlaksananya penyediaan bahan non medis sebanyak 1 paket, terlaksananya pengadaan pakan ternak ikan sebanyak 1 paket dan terlaksananya pengadaan bahan obat obatan ikan sebanyak 1 paket. 4. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan budidaya, terwujudnya rehab kolam BBI Siwarak di dusun Ngampin sebanyak 1 paket, terlaksananya rehab bangunan BBI Siwarak sebanyak 1 paket, terlaksananya rehab saluran air BBI Siwarak sebanyak 1 paket, terlaksananya pengadaan paket resirkulasi air sebanyak 1 paket, terlaksananya pengadaanalat pengukur dan pemeriksa kesehatan ikan sebanyak 1 paket, terlaksananya pengadaan sarana perbenihan sebanyak 24 buah dan terlaksananya pengadaan sarana kebersihan sebanyak 4 buah. |
| s. | Pengembangan Perikanan Tangkap | 1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap, terlaksananya pembinaan kelompok nelayan sebanyak 35 kelompok nelayan (875 orang) dan terlaksananya gerakan peduli Rawapening sebanyak 1 paket. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan, terlaksananya pengelolaan TPI Desa Rowoboni Kec. Banyubiru sebanyak 1 paket. 3. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, terfasilitasinya pengadaan alat tangkap untuk nelayan sebanyak 50 paket, terfasilitasinya prasarana penangkapan nelayan berupa perahu sebanyak 50 paket, tersosialisasinya penataan Rawapening sebanyak 10 kali, terfasilitasinya penataan rawa pening sebanyak 15 paket dan terlaksananya pengawasan penataan rawa pening sebanyak 4 kali. 4. Pemberdayaan Nelayan dan Peningkatan Pelestarian Sumber Daya Ikan, terlaksananya pengawasan Pokmaswa Rawapening sebanyak 12 kali, terlaksananya sosialisasi pelestarian sumber daya ikan PUD/Rawapening sebanyak 4 kali dan terlaksananya penebaran benih ikan nila di PUD/Rawapening sebanyak 432.000 ikan. |
| o. | Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 1. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, terlaksananya pembinaan Poklahsar hasil perikanan sebanyak 25 kali, terlaksananya kegiatan sosialisasi Forikan sebanyak 1 kali dan mengikuti lomba masak ikan tingkat provinsi sebanyak 1 kali. 2. Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan, terlaksananya penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan sebanyak 3 kali. 3. Promosi atas hasil produksi perikanan, terlaksananya Gemarikan sebanyak 2 kali. 4. Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis, operasionalisasi pasar ikan heigenis di 1 lokasi. |

**BAB III**

**IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Secara keseluruhan untuk target pendapatan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 2.875.010.150,- (mencapai 81,78%) bila dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.3.515.686.000,-

Tabel Perkembangan Pendapatan Daerah berdasarkan Sumbernya

Tahun 2018 – 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sumber Pendapatan** | **2019** | | **2018** | |
| **( Rp. )** | **( % )** | **( Rp. )** | **( % )** |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 2.875.010.150 | 81,78 | 5.853.733.849 | 94,69 |
|  | **Total PAD** | **2.875.010.150** | **81,78** | **5.853.733.849** | **94,69** |

Tabel Perkembangan Belanja Daerah

Tahun 2018–2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **BELANJA** | **2019** | | **2018** | |
| **( Rp. )** | **%** | **( Rp. )** | **%** |
| **1** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **17.957.023.413** | **88,63** | **17.398.128.225** | **94,84** |
|  | Belanja Pegawai | 17.957.023.413 | 88,63 | 17.398.128.225 | 94,84 |
|  | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **BELANJA LANGSUNG** | **44.844.835.472** | **96,77** | **49.354.979.323** | **96,75** |
|  | Belanja Pegawai | 113.769.000 | 88,74 | 88.730.000 | 88,30 |
|  | Belanja Barang dan Jasa | 42.552.049.047 | 96,95 | 47.647.164.073 | 96,79 |
|  | Belanja Modal | 2.179.017.425 | 93,80 | 1.619.085.250 | 95,99 |
|  | **Jumlah** | **62.801.858.885** | **94,29** | **66.753.107.548** | **0** |

Untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai selama tahun 2019 belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 17.957.023.413,00 (mencapai 88,63%) bila dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp**.** 20.260.152.000,00. Belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu mengalami penurunan. Belanja langsung tahun ini mencapai 94,86%, sedangkan belanja tidak langsung terealisasi 88,63%.

Bila dikaitkan dengan program, kegiatan sesuai bidang kewenangan, dari anggaran yang tersedia untuk belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp. 46.342.319.000,00 terealisasi sebesar Rp. 44.844.835.472,00 (96,77%) yang teralokasi pada 3 urusan yaitu urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan urusan Kelautan dan Perikanan yang mencakup 20 program dan 75 kegiatan sesuai DPA dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2019.

Jumlah total rekapitulasi setor kembali/CP *(Contra Post)* Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 217.401.366,00, yaitu terdiri dari ;

1. Pengembalian LS gaji a.n Eko Saptono karena kelebihan dalam penghitungan tambahan penghasilan berdasar prestasi kerja sebesar Rp. 415.000,-
2. Pengembalian LS gaji a.n Sri Hartini karena kelebihan dalam penghitungan tambahan penghasilan berdasar prestasi kerja sebesar Rp. 415.000,-
3. Pengembalian LS gaji a.n Banjar A, Md karena kelebihan dalam penghitungan gaji sebesar Rp. 3.762.100,-
4. Pengembalian LS gaji a.n Widodo STP karena kelebihan dalam penghitungan tambahan penghasilan berdasar prestasi kerja sebesar Rp. 1.567.500,-
5. Pengembalian LS gaji a.n Daliman karena kelebihan dalam penghitungan gaji sebesar Rp. 968.556,-
6. Pengembalian LS gaji a.n Suharto karena kelebihan dalam penghitungan gaji sebesar Rp. 17.364.400,-
7. Pengembalian LS gaji a.n Sri Sumarsih karena kelebihan dalam penghitungan gaji sebesar Rp. 360.000,-
8. Pengembalian TU pada kegiatan Pengadaan Sarpras Teknologi Pertanian Tepat Guna dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 458.837,-
9. Pengembalian TU Pada Kegiatan Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 276.400,-
10. Pengembalian sisa UP sebesar Rp. 191.813.573,-

**BAB IV**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Bupati Nomor Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Semarang

Untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran didasarkan pada realisasi dana APBD yang telah dipertanggungjawabkan dan telah dilakukan verifikasi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu untuk disajikan meliputi:

1. **Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

1. **Akuntansi Belanja dan Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa .dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran Kas umum Daerah (KUD) yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat timbulnya Kewajiban, Terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurnan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Suatu Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (akan menjadi aset)jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

* + Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  + Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  + Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

1. **Persediaan**

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

1. Barang perlengkapan (suplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
2. Bahan atau perlengkapan (suplies) yang digunakan dalam rangka proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan pipa, persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, akan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), pengukuran persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi / rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnyaq yang serupa mengurangi biaya perolehan.

1. **Kewajiban**

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Utang kepada Pihak Ketiga saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

1. **Koreksi Kesalahan**
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
3. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (dengan PERDA), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
4. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
5. **Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran**

Aset tetap (tidak termasuk yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah) diakui dan / atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Verifikasi antara lain, meliputi reklasifikasi belanja modal yang tidak sesuai peruntukan rekeningnya, misalnya belanja modal jaringan listrik / telpon (tambah daya listrik kantor) dikapitalisasi ke nilai bangunan karena nilainya melekat di bangunan, kecuali jaringan untuk infrastruktur diluar bangunan. Aset tetap yang berasal dari donasi, sumbangan, dan hibah diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan Aset telah dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan Aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Aset tetap yang bersangkutan. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nilai aset tetap bisa disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset tetap karena meningkatnya manfaat Aset tetap. Pengembangan Aset tetap diharapkan akan(1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, dan/ atau (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah Aset tetap. Termasuk dalam pengembangan Aset tetap adalah rehabilitasi dan pemeliharaan Aset tetap.

Biaya pengembangan yang memenuhi syarat akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset tetap. Pengembangan Aset tetap berasal dari pos belanja operasional pemeliharaan dan Belanja Modal.

Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama Aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari Aset tetap semula dan menambah biaya penggantian pada harga perolehan Aset tetap.

Pengukuran Aset Tetap

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tanah yang disajikan dalam neraca berdasarkan tanah yang dimiliki dan atau dikuasai dan dilaporkan oleh masing-masing Unit Kerja baik berasal dari perolehan hak, ataupun yang berasal dari instansi vertikal. Pemisahan klasifikasi tanah berdasarkan legalitas status kepemilikan tidak disajikan mengingat validitas data belum teruji dan belum dilakukan pemutakhiran data untuk keseluruhan.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan aset yang ada yang dilaporkan oleh unit kerja pada konsultan apraisal, dan dinilai berdasarkan harga pasar saat dinilai. Sesudahnya setiap terjadi penambahan dinilai dengan harga perolehan. Harga perolehan meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jaringan listrik, air bersih, dan sambungan telepon yang melekat pada gedung (in door) dicatat sebagai satu kesatuan dengan gedung.

Biaya perolehan listrik, air bersih, dan telepon yang bersifat tambahan fasilitas (out door) dicatat terpisah dari gedung dan dicatat sebagai jaringan. Termasuk dalam kategori ini misalkan: jaringan listrik untuk lampu taman dan air mancur, telepon, jaringan air untuk fasilitas pemadam kebakaran.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Jembatan, Bangunan Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

* + 1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin – mesin dan kendaraan bermotor , alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

* + 1. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas , yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.Aset tetap lainnya merupakan aset buku, monumen rambu, gapura dan tugu batas disajikan berdasarkan nilai wajar aset / barang yang ada saat dilakukan inventarisasi. Sedangkan penambahan sesudahnya berdasarkan harga perolehan. Khusus buku termasuk yang nilai perolehannya dibawah Rp.300.000,00.

* + 1. Aset Lain-lain

Aset Tak Berwujud (software/ program aplikasi ) yang disajikan merupakan tambahan mutasi berdasarkan realisasi anggaran belanja modal sejak tahun 2003 yang dapat diinventarisasi dan dinilai dengan menggunakan harga perolehan. Aset Lain-lain juga untuk rekening piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sulit dipastikan realisasi pembayarannya.

1. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/pembayaran utang yang bersangkutan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang dibayarkan dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, yang terdiri dari:

1. Pendapatan diterima dimuka: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan mempunyai kewajiban pendapatan diterima dimuka yang didapat dari retribusi Sewa Lahan (RPH Ambarawa), Retribusi Sewa Tanah da Bangunan (Kolam BBI SIwarak dan PIH), dan retribusi Sewa Kios.
2. Utang Belanja Pegawai: merupakan utang jangka pendek yang berupa insentif atau upah pungut yang belum terealisasi di tahun 2019 dari perhitungan seluruh retribusi yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang.
3. **Ekuitas**

**Ekuitas** adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Arti ekuitas dapat juga didefinisikan sebagai modal atau kekayaan suatu entitas, yaitu selisih jumlah aktiva (aset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban).

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada OPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, secara garis besar jumlah anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | | Tahun 2018 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 3.515.686.000,00 | 2.875.010.150,00 | 81,78 | 5.853.733.849,00 |
| 2 | Belanja | 66.602.471.000,00 | 62.801.858.885,00 | 94,29 | 66.753.107.548,00 |
| 3 | Surplus (Defisit) | (63.086.785.000,00) | (59.926.848.735,00) | 94,99 |  |

Dari data di atas menunjukkan bahwa terdapat realisasi defisit anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 59.926.848.735,00,-. Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 dan perbandingannya dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN**

Pendapatan Daerah pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Syah, dengan anggaran dan realisasinya dalam tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

* 1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Retribusi Daerah | 3.160.248.000,00 | 2.525.621.150,00 | 2.404.627.350,00 |
| 2. | Lain lain PAD yang Sah | 355.438.000,00 | 349.389.000,00 | 3.449.106.499,00 |
|  | Jumlah | **3.515.686.000,00** | **2.875.010.150,00** | **5.853.733.849,00** |

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.515.686.000,00sedangkan realisasinya sebesar Rp. **2.875.010.150,00** atau sebesar 81,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 5.853.733.849,00maka realisasi tahun ini turun sebesar Rp. 2.979.921.699,00 atau 203,70% dengan penjelasan sebagai berikut :

* + 1. ***Retribusi Daerah***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 |
| Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. | Retribusi Jasa Umum :   * Retribusi Pelayanan Sampah Pasar * Retribusi Pelayanan Pasar Jetis * Retribusi Pelayanan Pasar Hewan * Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Puskeswan | 12.000  887.396.500  705.388.500  43.855.000 | 12.000  834.088.000  444.490.600  31.125.000 | 22.690.800  817.052.000  422.159.700  - |
| 2. | Retribusi Jasa Usaha   * Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :  1. Retribusi   Sewa Tanah   1. Retribusi Sewa Lab 2. Retribusi Timbangan Ternak 3. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan  * Retribusi Tempat Khusus Parkir * Retribusi Rumah Potong Hewan * Retribusi Penjualan Prod Usaha Daerah | 50.017.000  34.800.000  21.900.000  509.157.000  618.892.000  136.830.000  152.000.000 | 56.817.000  35.147.000  10.570.500  245.340.850  569.578.000  144.533.700  153.918.500 | 45.512.500  33.500.000  12.609.750  261.132.700  505.051.000  132.539.400  152.379.500 |
|  |  | 3.160.248.000 | 2.525.621.150 | 2.404.627.350 |

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 3.160.248.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.525.621.150,00 atau 79,92 %. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.404.627.350,00 maka realisasinya naik sebesar Rp. 119.795.650,00. Untuk retribusi sampah pasar sebesar Rp. 12.000,- merupakan penerimaan retribusi sampah tanggal 31 Desember 2018 yang disetorkan tanggal 2 januari 2019.

Retribusi Pelayanan pasar jetis tidak mencapai target dikarenakan adanya kemarau panjang yang berdampak pada hasil pertanian terutama sayur dari berbagai daerah yang mengakibatkan suplai sayur yang diperjualbelikan di pasar jetis menurun.

Retribusi pelayanan pasar hewan tidak mencapai target dikarenakan adanya penurunan jumlah ternak kambing/domba dan sapi yang masuk ke pasar hewan, juga adanya jual beli ternak melalui online dan adanya kandang-kandang penampungan ternak sapi dan kambing sehingga pembeli tidak perlu datang ke pasar hewan.

Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan tidak mencapai target dikarenakan di Puskeswan mengalami kekurangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan sehingga petugas tidak dapat melayani pelayanan kesehatan hewan secara maksimal.

Retribusi Pelayanan Timbangan Ternak tidak mencapai target karena tidak semua pedagangan menggunakan jasa timbangan ternak yang ada di pasar hewan kebanyakan hanya ternak sapi yang akan dipotong saja atau sapi kereman yang ditimbangan.

Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehataan hewan terdapat kenaikan target dari Rp. 345.633.000,- di tahun 2018 menjadi Rp. 509.157.000 (2019) Menyebabkan tidak tercapainya angka target karena angka tersebut tidak dapat dihitung secara potensi.

* 1. Pada retribusi tempat parkir khusus adanya tempat parkir/lokasi parkir di sekitar pasar hewan yang dikelola oleh perorangan/masyarakat setempat menyebabkan berkurangnya pengunjung yang parkir di dalam area pasar hewan.
  2. kendaraan yang diparkir di lokasi parkir yang dikelola pasar hewan (9 titik parkir) sebagian besar adalah pedagang pasar hewan sehingga mereka memarkirkan kendaraannya sampai pasar selesai dan hanya membayar 1 kali parkir, berbeda dengan parkir yang ada di pinggir pasar hewan yang rata rata adalah konsumen, sehingga keluar masuknya kendaraan yang parkir cukup banyak.
  3. Sarana parkir di pasar hewan kurang represenatif, dibandingkan dengan parkir yang di luar, sehingga para konsumen lebih banyak memlilih tempat parkir yang sarananya memadai dan tidak becek pada saat musim hujan.
  4. ***Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 |
| Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan :   * Penjualan Hasil Pertanian * Penjualan Hasil Peternakan | 66.765.000  - | 57.566.000  - | 66.599.000  3.035.236.000 |
| 2. | Fasilitasi Sosial dan Fasilitas Umum   * Fasilitas Umum | 33.673.000 | 33.673.000 | 32.473.000 |
| 3. | Pendapatan Lain-lain :   * Laba Revolving Dinas Peternakan * Penerimaan Lainnya | 255.000.000  - | 258.150.000  - | 262.160.000  52.638.499 |
|  |  | 355.438.000 | 349.389.000 | 3.449.106.499 |

Lain-lain PAD Yang Syah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 355.438.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 349.389.000,00 atau sebesar 98,30%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 3.449.106.499,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp. 3.099.717.499,00 dikarenakan adanya penjualan ternak UPTD Mulyorejo Sebagai akibat dari pembubaran UPTD Mulyorejo.

Untuk penjualan hasil pertanian tidak mencapai target dikarenakan ketersediaan air kurang akibat musim kemarau panjang sehingga sehingga panen tidak maksimal.

**5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA**

Anggaran Belanja Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan anggaran dan realisasinya pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1. | Belanja Operasional  - Belanja Pegawai  - Belanja Barang dan Jasa  - Belanja Hibah | **64.279.417.000,-**  20.388.352.000,-  10.304.910.000,-  33.586.155.000,- | **60.622.841.460,-**  18.070.792.413,-  9.788.429.678,-  32.763.619.369,- | **65.134.022.298,-**  17.174.768.225,-  8.977.604.592,-  38.981.649.481,- |
| 2. | Belanja Modal   * Peralatan dan Mesin * Gedung dan Bangunan * Jalan, Irigasi dan Jaringan * Aset Tetap Lainnya | **2.323.054.000**,-  1.328.787.000,-  280.250.000,-  691.817.000,-  22.200.000,- | **2.179.017.425,**-  1.208.257.425,-  278.721.000,- 673.339.000,-  18.700.000,- | **1.619.085.250**,-  173.832.000,-  767.346.000,- 677.907.250,-  0,- |
|  | Jumlah | **66.602.471.000**,- | **62.801.858.885**,- | **66.753.107.548**,- |

Anggaran Belanja Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 66.602.471.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 62.801.858.885,00 atau sebesar 94,29%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 66.753.107.548,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp. 3.951.248.663,00

1. **Belanja Operasi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
|  |  |  |  |  |
| 1  2  3 | Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah | 20.388.352.000,-  10.304.910.000,-  33.586.155.000,- | 18.070.792.413,-  9.788.429.678,-  32.763.619.369,- | 17.174.768.225,-  8.977.604.592,-  38.981.649.481,- |
|  | Jumlah | **64.279.417.000,-** | **60.622.841.460,-** | **65.134.022.298,-** |

Belanja Operasi Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dianggarkan sebesar Rp.64.279.417.000,- dan realisasi tahun 2019 adalah sebesar Rp. 60.622.841.460,-atau 94,31%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 65.134.022.298,- maka mengalami penurunan sebesar Rp. 4.511.180.838,-

Hal ini disebabkan karena:

* 1. Adanya efisiensi belanja
  2. Adanya sisa tender
  3. Adanya penyesuaian harga
  4. Adanya penyesuaian kegiatan

.

***Belanja Pegawai***

Belanja Pegawai untuk Tahun 2019 digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Belanja Gaji dan Tunjangan  Belanja Tambahan Penghasilan PNS  Insentif Pemungutan Retribusi Daerah\*\*  Honorarium PNS  Honorarium Non PNS  Uang Lembur  Tunjangan Hari Raya | 15.064.113.000,-  5.085.430.000,-  110.609.000,-  45.800.000,-  47.170.000,-  35.230.000,-  0,- | 13.024.154.475,-  4.901.112.500,-  31.756.438,-  39.700.000,-  47.170.000,-  26.899.000,-  0,- | 13.194.982.026,-  3.565.596.250,-  37.994.949,-  33.200.000,-  26.600.000,-  28.930.000,-  287.465.000,- |
|  | **Jumlah** | 20.388.352.000**,-** | 18.070.792.413**,-** | 65.134.022.298**,-** |

Belanja Pegawai pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 20.388.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.070.792.413,- atau sebesar 88,63% mengalami penurunan sebesar Rp. 2.317.559.587,- atau 11,47%. Perbedaan antara target dan realisasi dikarenaan adanya pegawai yang pensiun. Terdapat anggaran gaji PPPK tetapi belum bisa dicaikan karena SK belum turun dan Anggaran tunjangan kinerja yang semula sudah dianggarkan naik tetapi tidak jadi naik sehingga terjadi sisa anggaran. Insentif pemungutan retribusi tidak tercapai karena target PAD tidak tercapai.

1. ***Belanja Barang dan Jasa***

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2019 digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22. | Biaya Bahan Pakai Habis Kantor  Biaya Bahan Material  Biaya Jasa Kantor  Belanja Premi Asuransi  Biaya Perawatan/Pemeliharaan  Biaya Cetak dan Penggandaan  Biaya Sewa Rumah/ Gedung  Biaya Sewa Sarana Mobilitas  Biaya Sewa Peralatan dan Perle-ngkapan Kantor  Biaya Makanan Dan Minuman  Biaya Pakaian Dinas  Biaya Pakaian Kerja  Biaya Pakaian Khusus dan Hari tertentu  Biaya Perjalanan Dinas  Biaya Kursus Pelatihan  Biaya Pemeliharaan  Biaya Jasa Konsultan  Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga  Belanja Kursus Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS  Belanja Honorarium Non Pegawai  Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat  Belanja Hibah Barang Untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 640.228.400,-  1.356.934.000,- 4.358.486.000,-  108.477.000,- 247.143.000,-  259.197.600,- 182.500.000,-  60.600.000,- 25.175.000,-  854.623.000,-  169.762.000,-  38.910.000,-  11.490.000,-  1.510.095.000,-  13.800.000,-  130.039.000,-  151.000.000,-  33.586.155.000,-  13.800.000,-  150.300.000,-  36.150.000,-  0,- | 623.650.464,-  1.301.200.077,- 4.162.672.227,-  96.699.287,- 201.382.975,- 219.482.100,-  172.849.089,- 56.700.000,-  19.470.000,-  845.621.800,-  160.033.000,-  38.910.000,-  11.490.000,-  1.450.954.489,-  13.800.000,-  129.717.000,-  104.697.170,-  32.763.619.369,-  13.800.000,-  142.950.000,-  36.150.000,-  0,- | 563.863.584,-  823.243.420,-  3.852.390.392,-  76.225.280,-  223.874.720,-  209.950.900,-  170.550.000,-  29.500.000,-  10.458.000,-  605.040.300,-  0,-  18.940.000,-  3.600.000,-  1.136.184.996,-  0,-  622.093.000,-  194.500.000,-  0,-  0,-  98.100.000,-  27.000.000,-  0,- | |
|  | Jumlah | 43.891.065.000,- | 42.552.049.047,- | 47.647.164.073,- | |
| Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 43.891.065.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 42.552.049.047,- atau sebesar 96,95% mengalami penurunan dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 5.095.115.026,-   * Terdapat Efisiensi pada rekening belanja bahan habis pakai seperti alat kantor dan perlengkapan elektronik, belanja perangko dan materai, BBM. * Terdapat sisa pengehematan pada belanja bahan/bibit, bahan obat obatan dan bahan kimia. * Sisa tender pakan ternak dan efisiensi pada belanja makan minum, perjalanan dinas, lembur, dan penggandaan.  1. **Belanja Modal**   Belanja Modal pada tahun 2019 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Anggaran | Realisasi |  | | 1 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor | 155.286.000,- | 142.031.000,- | 0,- | | 2 | Belanja Modal Pengadaan Aat Angkutan Darat Tak Bermotor angkutan barang | 9.000.000,- | 9.000.000,- | 0,- | | 3 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan | 181.474.000,- | 161.940.125,- | 96.721.000,- | | 4 | Belanja Modal Pengadaan Alat kantor | 174.800.000,- | 154.789.300,- | 2.904.000,- | | 5 | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | 91.827.000,- | 87.737.000,- | 31.218.000,- | | 6 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 668.400.000,- | 609.260.000,- | 0,- | | 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat Studio | 27.000.000,- | 22.500.000,- | 0,- | | 8 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 0,- | 0,- | 3.300.000,- | | 9 | Belanja Modal Pengadaan unit Unit Laboratorium | 21.000.000,- | 21.000.000,- | 39.689.000,- | | 10 | Belanja Modal Pengadaan bangunan Gedung Tempat Kerja | 280.250.000,- | 278.721.000,- | 767.346.000,- | | 11 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Irigasi | 691.817.000,- | 673.339.000,- | 677.907.250,00 | | 12 | Belanja Modal Pengadaan Hewan | 22.200.000,- | 18.700.000,- | 0,- | |  | Total | 2.323.054.000,- | 2.179.017.425,- | 1.619.085.250,- |   Belanja Modal pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 2.323.054.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.179.017.425,- atau sebesar 93,80%.mengalami Kenaikan dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 559.932.175,-  Di tahun 2019 terdapat penambahan belanja modal berupa motor roda 3 pada UPTD Jetis Sejumlah 3 Unit dan Sepeda Motor Roda 2 Sejumlah 2 Unit.  Pada Belanja Modal Pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang terdapat penambahan senilai Rp.9.000.000,- berupa Gerobak Sampah 2 unit pada UPTD Jetis.  Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi dikarenakan pada Belanja Modal Pengadaan alat pertanian terdapat alat tester GKG tidak dibeli karena harga melebihi pagu dan ada barang pakai habis dan ekstrakom. Pada belanja modal Alat pengolah perikanan ada sisa kar ena ada yang termasuk barang ekstrakom. Selebihnya pada belanja modal yang lain selisih dikarenakan sisa kontrak.   * + 1. ***Belanja Modal Tanah***   NIHIL   * + 1. ***Belanja Modal Peralatan dan Mesin***  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. | BM Alat Angkutan Darat Bermotor  BM Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor  BM Pengadaan Alat Pengolahan  BM Pengadaan Alat Kantor  BMPengadaan Alat Rumah Tangga  BM Pengadaan Komputer  BM Pengadaan Alat Studio  BM Pengadaan Alat Kedokteran  BM Pengadaan unit unit laboratorium | 155.286.000,-  9.000.000,-  181.474.000,,-  174.800.000,-  91.827.000,-  668.400.000,-  27.000.000,-  0,-  21.000.000,- | 142.031.000,-  9.000.000,-  161.940.125,-  154.789.300,-  87.737.000,-  609.260.000,-  22.500.000,-  0,  21.000.000,- | 0,-  0,-  96.721.000,-  2.904.000,-  31.218.000,-  0,-  0,-  3.300.000,-  39.689.000,- | |  | Jumlah | 1.328.787.000,- | 1.208.257.425,- | 173.832.000,- |  * + 1. ***Belanja Modal Gedung dan Bangunan***  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | | 1. | BM. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja | 280.250.000,- | 278.721.000,- | 767.346.000,- | |  | Jumlah | 280.250.000,- | 278.721.000,- | 767.346.000,- |  * + 1. ***Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan***  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | | 1. | BM Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 691.817.000,- | 673.339.000,- | 677.907.250,- | |  | Jumlah | 691.817.000,- | 673.339.000,- | 677.907.250,- |  * + 1. ***Belanja Modal Aset Tetap Lainnya***  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | | Tahun 2018 | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | | 1. | BM Pengadaan Binatang Ternak | 22.200.000,- | 18.700.000,- | 0,- | |  | Jumlah | 22.200.000,- | 18.700.000,- | 0,- |   **5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA**  Neraca Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2018. Adapun uraian secara lengkap seperti tersaji pada penjelasan sebagai berikut :  **5.2.1 ASET** | | | | | | | | |
| Total aset Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 73.944.438.388,29,- mengalami Penurunan dibandingakan dengan posisi 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 75.297.931.238,69 Jumlah tersebut terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan gambaran sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | Realisasi ( Rp ) | Realisasi ( Rp ) | | 1.  2.  3.  4. | Aset Lancar  Investasi Jangka Panjang  Aset Tetap  Aset Lainnya | 344.499.049,14,-  0,00,-  56.034.535.272,48,-  17.565.404.066,67,- | 355.416.659,79,-  0,00,-  57.236.195.512,23,- 17.706.319.066,67 | |  | Jumlah | 73.944.438.388,29,- | 75.297.931.283,69 | | | | | | | |
| * 1. **Aset Lancar**   Aset lancar Per 31 Desember 2019 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3. | Kas dan setara kas  Beban Dibayar Dimuka  Persediaan | 1.200.000,-  5.287.104,14,-  338.011.945,00,- | 0,-  5.282.654,79,-  350.134.005,00,- | |  | Jumlah | 344.499.049,14,- | 355.416.659,79,- | | | | | | | |
|  | Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 344.499.049,14  yang terinci sebagai berikut :   1. Beban Dibayar Dimuka   Rp. 5.287.104,14 adalah saldo Asuransi UPTD Jetis per 31 Desember 2019. Pada tahun 2018 tedapat saldo Rp. 5.282.654,79 kemudian terjadi penambahan sejumlah 6.911.000 di Bulan Oktober dikarenakan Kontrak Asuransi Resiko Khusus Pasar berlaku dari Bulan Oktober 2018 sampai Bulan Oktober 2019. Sehingga di Bulan Oktoer 2019 terjadi penambahan untuk periode 2019-2020. Pengurangan sebesar Rp. 6.906.550,65 dari Kontrak periode 2018-2019.   1. Persediaan   Rp. 338.011.945,00 | | | | | |
|  | Jumlah nilai persediaan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Alat Tulis Kantor  Cetak  Alat Listrik  Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih  Bahan Pakai Habis Kesehatan Medis  Bahan Pakai Habis Kesehatan Non Medis  Bibit Tanaman  Bibit Ternak  Bahan Obat - obatan  Pakan Ternak | 8.839.445,-  30.639.100,-  354.000,-  135.000,-  2.960.900,-  535.000,-  6.160.200,-  18.420.000,-  249.398.800,-  20.569.500,- | 985.025,-  47.620.100,-  0,-  300.000,-  10.790.300,-  1.690.000,-  434.800,-  15.667.500,-  249.858.780,-  22.787.500,- | |  | Jumlah | 338.011.945,- | 350.134.005,- | | | | | | |
|  | Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 338.011.945,- mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 350.134.005,-  .   * 1. **Aset Tetap ........................................................................................ Rp.** 56.034.535.272,48   Aset Tetap per 31 Desember 2019 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi Dalam Pengerjaan  Akumulasi Penyusutan | 14.096.595.783,00  18.887.218.114,-  46.868.020.201,00  12.614.981.284,-  1.057.740.350,00  0,00  (37.490.020.459,52) | 14.096.595.783,00  17.852.547.070,00  46.490.305.242,00  12.003.865.869,00  1.075.316.850,00  0,00  (34.282.435.301,77) | |  | Jumlah | 56.034.535.272,48,- | 57.236.195.512,23 |   Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 56.034.535.272,48 mengalami penurunan sebesar dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 57.236.195.512,23 dengan rincian sebagai berikut :   * + 1. Tanah .............................................................................. Rp. 14.096.595.783,00  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3. | Kolam Ikan  Tanah Pertanian  Tanah Untuk Bangunan Gedung | 0,00  4.148.780.450,00  9.947.815.333,00 | 1.644.703.950,00  0,00  12.451.891.833,00 | |  | Jumlah | 14.096.595.783,00 | 14.096.595.783,00 |   Terdapat perbedaan pencatatan pada neraca 2019 dengan KIB 2019 pada aset tetap – tanah.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Neraca 2019 | KIB 2019 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | Aset tetap – tanah  Tanah Pertanian  Tanah sawah satu tahun  ditanami  Tanah tegalan  Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan  Tanah bsasah  Tanah kering | 1.734.550.450,-  2.414.230.000,- | 1.734.550.450,-  2.414.230.000,- |   Hal ini disebabkan pada neraca 2019 dengan aplikasi SIPKD tidak menyajikan kode rekening untuk tanah basah dan tanah kering.  1.2.2 Peralatan dan Mesin .......................................................... Rp. 18.887.218.114,00   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24. | Alat-alat Bantu  Alat Angkutan Darat Bermotor  Alat Angkutan Berat Tak Bermotor  Alat Angkut Apung Bermotor  Alat Bengkel Bermesin  Alat Bengkel Tak Bermesin  Alat Ukur  Alat Pengolahan  Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan  Alat Kantor  Alat Rumah Tangga  Komputer  Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat  Alat Studio  Alat Komunikasi  Alat Kedokteran  Alat Kesehatan  Unit-unit Laboratorium  Alat Peraga / Praktek Sekolah  Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir  Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)  Alat Laboratorium Lingkungan Hidup  Persenjataan Non Sejata Api  Alat Keamanan dan Perlindungan | 764.167.492,00  4.831.699.183,00  30.925.000,00  345.675.000,00  84.760.750,00  184.375.000,00  524.408.957,00  3.665.980.715,00  369.938.723,00  1.359.692.652,00  1.881.181.119,00  2.166.092.790,00  287.674.970,00  267.084.062,00  111.201.000,00  582.761.188,00  1.320.000,00  1.353.928.677,00  4.635.446,00  6.336.052,00  3.000.000,00  30.895.596,00  393.534,00  29.090.208,00 | 796.312.992,00  4.757.168.183,00  6.525.000,00  345.675.000,00  84.760.750,00  184.375.000,00  456.550.588,00  3.142.891.640,00  874.214.612,00  528.287.657,00  1.955.775.963,00  1.578.002.799,00  287.674.970,00  705.059.893,00  162.216.650,00  334.273.090,00  1.320.000,00  1.502.566.025,00  4.635.446,00  5.672.500,00  26.887.500,00  111.700.812,00  0,00  0,00 | |  | Jumlah | 18.887.218.114,- | 17.852.547.070,- |   Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 18.887.218.114,- mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 17.852.547.070,-   * + 1. Gedung dan Bangunan .............................................................. Rp. 46.868.020.201,00  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3. | Bangunan Gd tempat Kerja  Bangunan Gd Tempat Tinggal  Tugu Titik Kontrol | 46.035.217.997,-  665.042.204,-  167.760.000,- | 45.657.503.038,-  665.042.204,-  167.760.000,- | |  | Jumlah | 46.868.020.201,- | 46.490.305.242,- |   Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 46.868.020.201,- mengalami peningkatan sebesar dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 46.490.305.242,-   * + 1. Jalan, Irigasi dan Jaringan ....................................................... Rp. 12.614.981.284,00  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. | Jalan  Bangunan Air Irigasi  Bangunan Pengaman Sungai dan Penangulangan Bencana Alam  B.Pengemb.SDA dan Air Tanah  B. Air Bersih/Baku  Instalasi Air Minum Bersih  Instalasi Pengolah Sampah Organik  Instalsi Gardu Lstrik  Jaringan Listrik  Jaringan Telepon | 1.172.779.178,-  7.224.439.835,-  668.324.340,-  488.645.900,-  2.666.858.631,-  109.438.000,-  587.400,-  253.643.000,-  5.645.000,-  24.620.000,- | 1.172.779.178,-  7.189.184.835,-  531.919.412,-  488.645.900,-  2.233.048.144,-  109.438.000,-  587.400,-  253.643.000,-  0,-  24.620.000,- | |  | Jumlah | 12.614.981.284,- | 12.003.865.869,- |   Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 12.614.981.284,- mengalami peningkatan sebesar dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 12.003.865.869,-   * + 1. Aset Tetap Lainnya .................................................................... Rp. 1.057.740.350,00  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3. | Buku  Hewan  Tanaman | 243.791.000,-  473.139.750,-  340.809.600,- | 243.791.000,-  490.716.250,-  340.809.600,- | |  | Jumlah | 1.057.740.350,- | 1.075.316.850,- |   Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.057.740.350,- mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.075.316.850,-   * + 1. Akumulasi Penyusutan ........................................................... Rp. (37.490.020.459,52)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2.  3.  4. | AP Peralatan dan Mesin  AP Gedung dan Bangunan  AP Jalan,Irigasi dan Jaringan  AP Aset Tetap Lainnya | (9.514.250.375,47) (19.387.521.141,88)  (8.356.294.822,17)  (231.954.120,00) | (8.695.285.920,82)  (17.710.465.059,86)  (7.655.747.361,09)  (220.936.960,00) | |  | Jumlah | (37.490.020.459,52) | (34.282.435.301,77) |   Jumlah Akumulasi Penyusutan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 37.490.020.459,52 mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2018 adalah sebesar Rp. 34.282.435.301,77   * 1. **Aset Lainnya ........................................................................................... Rp.** 17.565.404.066,67   Aset Tetap per 31 Desember 2019 digambarkan sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2. | Aset Tidak berwujud  Aset Lain - Lain | 26.235.000,-  17.539.169.066,67,- | 0,-  17.706.319.066,67,- | |  | Jumlah | 17.565.404.066,67,- | 17.706.319.066,67,- |   Terdapat perbedaan pencatatan pada Neraca 2019 dengan KIB 2019 pada aset lain lain sebagai berikut:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Neraca 2019 | KIB 2019 | | 1.  2. | Aset Lainnya  Aset Lain - Lain | 17.539.169.066,67,- | 16.974.869.067,- |   Terdapat selisih 564.299.999,67 antara neraca dengan KIB.  Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 17.565.404.066,67 mengalami penurunan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 17.706.319.066,67. Terdapat selisih antara neraca dan KIB sebesar Rp. 2.316.666,67 penyusutan aset lain lain dikarenakan barang hilang bukan berasal dari APBD II. Penambahan pada Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa Software senilai 29.915.000,-  **5.2.2 KEWAJIBAN**  Kewajiban per 31 Desember 2019 digambarkan sebagai berikut ;   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | Tahun 2019 | Tahun 2018 | | 1.  2. | Pendapatan Diterima Dimuka  Utang Belanja Gaji dan Tunjangan | 11.391.815,94  3.167.753,00 | 1.557.449,06  7.159.883,00 | |  | Jumlah | 14.559.568,94 | 8.717.332,06 |   Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14.559.568,94 mengalami peningkatan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 8.717.332,06  **5.2.3 EKUITAS DANA**  Ekuitas Dana pada akhir Desember 2019 adalah sebesar Rp. 73.927.567.569,35mengalami penurunan dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 75.289.213.906,63  **5.3 PENJELASAN POS-POS LO**  Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan suplus/deficit dari operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.  Reviu atau laporan operasional pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang untuk tahun buku yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat beberapa hal yang terungkap:   1. Terdapat selisih antara pendapatan LRA dengan pendapatan LO sebesar Rp. 769.145.633,12 dimana pendapatan LRA sebesar Rp. 2,875.010.150,- lebih kecil daripada pendapatan LO sebesar Rp.3.644.155.783,- selesih tersebut terdiri dari:  * Pendapatan kelahiran ternak sebesar Rp. 8.780.000,- * Hibah ikan sebesar Rp. 10.000.000,- * Mutasi bersih pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 9.834.366,88 * Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp.760.200.000,-  1. Terdapat selisih realisasi belanja persediaan (LRA) dan beban persediaan (LO) sebesar Rp. 18.367.267,- yang terdiri dari:  * Penambahan sebesar Rp. 32.602.067 terdiri dari: * Mutasi persediaan sebesar Rp. 12.122.060,- * Kelahiran ternak Rp. 8.780.000,- * Belanja modal yang mejadi extrakompatable sebesar Rp. 11.700.007,- * Pengurangan sebesar Rp. 14.234.800,- terdiri dari: * Belanja yang tidak menjadi persediaan sebesar Rp. 5.434.000,- * Aset non persediaan sebesar Rp. 8.800.000,-   Penjelasan Pos Pos LO:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Pendapatan retribusi daerah | 2.573.352.783,12,- | 2.501.087.461,03,- | | 2. | Lain lain PAD yang sah | 291.823.000,- | 283.561.499,- | | 3. | Pendapatan Hibah | 10.000.000,- | 10.000.000,- | | 4. | Pendapatan Lainnya | 8.780.000,- | 1.360.550.000,- | | 5. | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | 0,- | 1.810.881.140,- | | 6. | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 760.200.000,- | 881.849.355,- | | 7. | Beban Pegawai | 18.066.800.283,- | 17.481.070.365,- | | 8. | Beban Barang dan Jasa | 9.814.538.545,65,- | 8.973.680.756,18,- | | 9. | Beban Hibah | 32.763.619.369,- | 40.088.099.481,- | | 10. | Beban penyusutan dan amortisasi | 3.382.695.881,68,- | 3.275.397.902,41,- | | 11. | Beban lain lain | 0,- | 36.740.000,- |   8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 31.125.000,- | 0,- | | 2. | Retribusi Pelayanan Persampahan | 12.000,- | 22.690.000,- | | 3. | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.268.744.233,12,- | 1.239.388.211,03,- | | 4. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 347.875.350,-,- | 352.754.550,- | | 5.  6. | Retribusi Tempat Khusus Parkir  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 569.578.000,-  211.484.500,- | 505.051.000,-  248.663.500,- |   8.1.4 Lain Lain PAD yang Sah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 33.673.000,- | 32.473.000,- | | 2. | Lain lain PAD yang Sah | 258.150.000,- | 251.088.499,- |   8.3.1 Pendapatan Hibah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 10.000.000,- | 10.000.000,- | |  |  |  |  |   8.3.3 Pendapatan Lainnya   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Pendapatan Lainnya | 8.780.000,- | 1.360.550.000,- | |  |  |  |  |   8.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Surplus Penjualan Aset Lain Lainya | 0,- | 1.810.881.140,- | |  |  |  |  |   8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya | 760.200.000,- | 881.849.355,- | |  |  |  |  |   9.1.1 Beban Pegawai   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Beban Gaji dan tunjangan | 13.024.154.475,- | 13.194.982.026,- | | 2. | Beban Tambahan Pengahasilan PNS | 4.901.112.500,- | 3.565.596.250,- | | 3. | Insentif Pemungutan retribusi daerah | 27.764.308,- | 32.207.089,- | | 4. | Honorarium PNS | 39.700.000,- | 33.200.000,- | | 5. | Honorarium Non PNS | 47.170.000,- | 26.600.000,- | | 6. | Uang Lembur | 26.899.000,- | 28.930.000,- | | 7. | Tunjangan Hari Raya | 0,- | 599.555.000,- |   9.1.2 Beban Barang dan Jasa   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Beban Habis Pakai | 610.356.644,- | 566.999.269,- | | 2. | Beban Persediaan Bahan/Material | 1.315.880.164,- | 1.151.089.880,- | | 3. | Beban Jasa Kantor | 4.162.672.227,- | 3.852.390.392,- | | 4. | Beban Premi Asuransi | 96.694.837,65,- | 77.546.899,18,- | | 5. | Beban Perawatan Kendaraan bermotor | 203.694.225,- | 223.874.720,- | | 6. | Beban Cetak dan Penggandaan | 236.463.100,- | 185.813.300,- | | 7. | Beban Sewa Rumah/gedung/Gudang/Parkir | 172.849.089,- | 170.550.000,- | | 8. | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 56.700.000,- | 29.500.000,- | | 9. | Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor | 19.470.000,- | 10.458.000,- | | 10. | Beban makanan dan minuman | 845.621.800,- | 605.040.300,- | | 11. | Beban Pakaian Dinas dan atributnya | 160.033.000,- | 0,- | | 12. | Beban Pakaian Kerja | 38.910.000,- | 18.940.000,- | | 13. | Beban Pakaian Khusus dan hari hari tertentu | 11.490.000 | 3.600.000,- | | 14. | Beban Perjalanan Dinas | 1.450.954.489,- | 1.136.184.996,- | | 15. | Beban Pemeliharaan | 135.151.800,- | 622.093.000,- | | 16. | Beban Jasa konsultasi | 104.697.170,- | 194.500.000,- | | 17. | Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 13.800.000,- | 0,- | | 18. | Beban Honorarium Non Pegawai | 142.950.000,- | 98.100.000,- | | 19. | Uang untuk diberikan pada pihak ketiga | 36.150.000,- | 27.000.000,- | |  |  |  |  |   9.1.5 Beban Hibah   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Beban Hibah Pada Kelompok masyarakat | 0,- | 17.959.036.481,- | | 2. | Beban Hibah barang untuk diserahkan pada kepada masyarakat | 32.763.619.369,- | 22.129.063.000,- |   9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Beban Penyusutan Peralatan dan mesin | 936.562.255,38,- | 864.707.598,46,- | | 2. | Beban Penyusutan Gedung | 1.677.956.429,83,- | 1.657.758.163,86,- | | 3. | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi | 755.702.536,47,- | 733.879.580,09,- | | 4. | Beban Penyusutan Aset | 11.017.160,0,- | 19.052.560,- | | 5. | Beban Amortisasi Aset tak berwujud | 1.457.500,- | 0,- |   9.1.9 Beban Lain Lain   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Beban Lain | 0,- | 36.740.000,- | | 2. | Beban Luar Biasa | 46.276.500,- | 578.585.635,- |   **5.4 PENJELASAN POS-POS LPE**  Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih dengan Ekuitas akhir pada neraca tahun sebelumnya sebesar Rp. 222.071.975.945,64 terdiri dari:   * RK PPKD tahun 2018 Sebesar Rp. 221.212.518.637,72 * Koreksi sebesar Rp. 859.457.307,92 yang tidak dapat ditelusuri.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Uraian | 2019 | 2018 | | 1. | Ekuita awal | (146.768.318.607,16) | (82.327.660.046,53) | | 2. | Surplus/Defisit | (60.429.774.796,21) | (63.595.644.684,56) | | 3. | RK PPKD | 281.125.660.972,72 | 221.212.518.637,72 | |  | Jumlah | 73.927.567.569,35 | 75.289.213.906,63 |   Analisis Horizontal merupakan analisis data/informasi keuangan antara data keuangan pada laporan yang satu dengan yang lain. Hasil dari analisis horizontal pada laporan keunagan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perikanan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:   1. Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca   Realisasi Belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya). Hasil analisis sebagai berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | * Realisasi Belanja Modal | : | 2.179.017.425,00 | | * Penambahan (penurunan) | : | 2.005.924.918,00 | | * Aset Tetap 2019 | : | 93.524.555.732,00 | | * Aset Tetap 2018 | : | 91.518.630.814,00 | | * Selisih | : | (173.092.507,00) |   Selisih tersebut terdiri dari:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | * Mutasi aset keluar | : | (Rp. 104.766.000,00) | | * Persediaan yang menjadi aset | : | Rp. 8.800.000,00 | | * Hibah Ikan | : | Rp. 10.000.000,00 | | * Reklasifikasi Software | : | (Rp. 29.150.000,00) | | * Belanja Modal Menjadi persediaan | : | (Rp. 11.700.007,00) | | * Beban Kematian ternak |  | (Rp. 46.276.500,00) | | JUMLAH |  | (Rp. 173.092.507,00) |  1. Pendapatan retribusi (LO) harus sama dengan pendapatan retribusi (LRA) dikurangi piutang retribusi awal tahun ditambah piutang retribusi akhir tahun. Hasil analisis sebagai berikut:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | * Pendapatan retribusi (LO) | : | 2.573.352.783,12 | | * Pendapatan retribusi (LRA) | : | 2.525.621.150,00 | | * Piutang retribusi akhir tahun (Neraca) | : | 0,00 | | * Piutang retribusi awal tahun (Neraca) | : | 0,00 | | * Selisih | : | 47.731.633,12 |   Selisih tersebut terdiri dari:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Uraian | LRA (Rp) | LO (Rp) | Selisih (Rp) | | Retribusi Pelayanan Pasar Jetis | 824.253.633,12 | 834.088.000 | (9.834.366,88) | | Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah | 211.484.500 | 153.918.500 | 57.566.000 | | JUMLAH | | | 47.731.633,12 |  1. Beban Persediaan (LO) harus sama dengan belanja barang dan jasa persediaan (LRA) ditambah persediaan awal tahun dikurangi persediaan akhir tahun. Hasil analisis sebagai berikut:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Beban Persediaan – LO | : | 2.162.699.908,00 | | Belanja Barang jasa – persediaan LRA | : | 2.144.332.641,00 | | Persediaan 2018 | : | 350.134.005,00 | | Persediaan 2019 | : | 338.011.945,00 | | Selisih | : | 6.245.207,00 |   Selisih tersebut terdiri dari:   * Selisih realisasi belanja barang dan jasa (LRA) dan beban barang jasa (LO) sebesar Rp. 18.367.267,00 * Mutasi persediaan sebesar Rp. 12.122.060,00  1. Beban Penyusutan (LO) arus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun. Hasil analisis sebagai berikut:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Beban penyusutan – LO | : | 3.157.910.703,31 | | Akumulasi penyusutan 2019 | : | (37.281.136.213,00) | | Akumulasi penyusutan 2018 | : | (34.282.435.301,77) | | Selisih | : | 159.209.792,08 |   Selisih tersebut terdiri dari:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | * Akumulasi aset keluar | : | Rp. 89.859.600,00 | | * Akumulasi Amortisasi | : | Rp. 1.457.500,00 | | * Koreksi ekuitas karena mapping | : | Rp. 67.892.692,00 | | JUMLAH | : | Rp. 159.209.792,00 | | | | | | |
|  |  | | | | | |

**BAB VI**

**PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1 ORGANISASI

Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang adalah Dinas yang terbentuk berdasarkan pada Perda Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan serta bidang pertanian sub bidang peternakan. Adapun susunan organisasi Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

* + - Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan
* Sekretariat Dinas yang terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

* Bidang Pertanian

- Seksi Hortikultura dan Pengembangan Usaha Pertanian

- Seksi Tanaman Pangan

- Seksi Organisme Pengganggu Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian

Tanaman Pangan

* Bidang Perkebunan

- Seksi Tanaman Tahunan

- Seksi Tanaman Semusim

- Seksi Organisme Pengganggu Tanaman, Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Pengembangan Usaha Perkebunan

* Bidang Peternakan yang terdiri dari :

- Seksi Perbibitan

- Seksi Budidaya

- Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak

* Bidang Kesehatan Hewanyang terdiri dari :

- SeksiPencegahan, Pengamanan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

- Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan

- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

* Bidang Perikanan yang terdiri dari :

- Seksi Perikanan Budidaya

- Seksi Perikanan Tangkap

- Seksi Pengembangan Usaha Perikanan

* Bidang Pangan yang terdiri dari :

- Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- Seksi Distribusi Pangan

- Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

* Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

- UPTD Perbibitan Pertanian

- UPTD Terminal Agribisnis

- UPTD Balai Benih Ikan

- UPTD Puskeswan, RPH dan Pasar Hewan

* Kelompok Jabatan Fungsional

**6.2 STRUKTUR KEPEGAWAIAN/ SUMBER DAYA MANUSIA**

Dinas Peternakan Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang di dukung dengan SDM sebanyak 377 yang terdiridari 180 orang PNS , 1 orang CPNS, 1 orang Pegawai Harian Lepas (PHL), 67 orang THL Pertanian, 8 Orang THL Perkebunan, 6 Orang THL Pusat dan 113 orang Tenaga Harian Lepas (tenaga BBI, tenaga Puskeswan, tenaga RPH,tenaga BPP, UPTD dan tenaga kantor). Untuk rincian pegawai berdasarkan golongan dan eselon sebagai berikut :

**Tabel Jumlah Pegawai Per Desember 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GOLONGAN** | **ESELON** | | | | **NON ESELON** | | **TOTAL** |
| **II** | **III** | **IV** | **V** | **FUNGSIONAL** | **STAF** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV/e | - | - | - | - | - | - | - |
| IV/d | - | - | - | - | - | - | - |
| IV/c | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| IV/b | - | 6 | - | - | 4 | 1 | 11 |
| IV/a | - | - | - | - | 13 | 7 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | 1 | 6 | - | - | 17 | 8 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| III/d | - | - | 23 | - | 14 | 3 | 40 |
| III/c | - | - | 4 | - | 12 | 4 | 20 |
| III/b | - | - | - | - | 7 | 12 | 19 |
| III/a | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | - | - | 27 | - | 46 | 27 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/d | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 |
| II/c | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| II/b | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| II/a | - | - | - | - | 15 | 2 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | - | - | - | - | 16 | 26 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/d | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| I/c | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| I/b | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| I/a | - | - | - | - | - | - | - |
| ­ |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPNS | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| PTT | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Harian Lepas | - | - | - | - | - | 113 | 113 |
| THL | - | - | - | - | - | 81 | 81 |
| JUMLAH | - | - | - | - | - | 196 | 196 |
| TOTAL | 1 | 6 | 27 | - | 79 | 264 | 377 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ungaran, 31 Desember 2019  Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan  Kabupaten Semarang  Selaku  Pengguna Anggaran  **Ir. Wigati Sunu, MBA**  Pembina Utama Muda  NIP 19640106 199103 1 006 |

**BAB VII**

**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 untuk dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Operasional yang semuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2019.

Berdasarkan Laporan Keuangan OPD Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2019 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi LRA Tahun Anggaran 2019 pada pos Pendapatan sebesar Rp. 2.875.010.150,- Atau mencapai 81.78% dari total anggaran Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3,515,686.000,- jika dibandingkan dengan realiasi Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 5,853.733.849,- maka jumlah realisasi untuk tahun anggaran 2019 mengalami penurunan. Begitu juga untuk Pos Belanja realisasi sebesar Rp. 62,801.858.885,- mencapai 94.29% dari total anggaran Rp. 66.602.471.000,-.mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebelumnya sebesar Rp. 66.753.107.548,-.
2. .Realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019 untuk pendapatan Rp. 3.644.155.783,12,- mengalami penurunan dari tahun 2018 Rp. 6.837.929.455,03,- sebesar 87.64% atau senilai Rp. 3.193.773.671,91,-
3. Jumla surplus/defisit Rp. 59.926.848.735,- atau sebesar 94.99% dari total Angaran Sebesar Rp. 63.086.785.000,-.
4. Jumlah Aset per 31 Desember 2019 Rp. 73.944.438.388,29,- mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp. 75.297.931.238,69,-.
5. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah Rp. 73.927.567.569,35,- mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp. 75.289.213.906,63,-
6. Jumlah Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2019 Rp. 18.066.800.283,-
7. Jumlah Beban per 31 Desember 2019 Rp. 64.073.930.579,33,-
8. Jumlah Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah Sebesar Rp.73.927.567.569,35

Demikian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ungaran, 31 Desember 2019  Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan  Kabupaten Semarang  Selaku  Pengguna Anggaran  **Ir. Wigati Sunu, MBA**  Pembina Utama Muda  NIP 19640106 199103 1 006 |

NOTE: beberapa penjelasan pada pos penjelasan LRA.. LO dan LPE berasal dari review inspektorat